BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya dibentuk sesuai Dengan Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 55/PMK.01/2007 Tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : KEP-112/PJ/2007 tanggal 9 agustus 2007 tentang penerapan organisasi, tata kerja dan saat mulai beroperasinya kantor pelayanan pajak pratama di lingkungan kanwil DJP jawa barat I. Moderenisasi perpajakan dilakukan dengan berdasarkan kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 12/PMK.01/2007. Peraturan tersebut menjelaskan mengenai pembentukan KPP baru yaitu diantara KPP pratama dimana kantor pelayanan pajak (KPP), kantor pelayanan pajak buumi dan bangunan (KPPBB), serta kantor pemeriksaan dan penyelidikan yang semula memiliki kantor terpisah, dilebur menjadi satu dan memiliki fungsi penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan, dan penagihan. Selain itu, dijelaskan pula mengenai KPP Cimahi kedalam wilayah sehingga menjadi KPP Pratama Majalaya, KPP Pratama Soreang dan KPP Pratama Cimahi.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-27/PJ./2007 tanggal 27 Juni 2007 ditunjuk Pejabat Sementara Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Majalaya Sdr. Wishone ST,Ak,M.Sc. NIP 06004635, dengan wliayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya adalah pecahan dari Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Cimahi yang merupakan peleburan dari tiga kantor yaitu kantor pemeriksa bandung satu, kantor pemeriksa bandung dua dan KPPBB bandung dua. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya telah memiliki gedung sendiri (Ex Karipka Bandung 1 dan Karipka Bandung 2) yang beralamat di Jalan Peta no 7 Bandung dan memiliki wilayah administrasi fiskal yang merupakan gabungan dari beberapa kantor pajak terdahulu yaitu : Cimahi dan KPPBB Bandung I dan Bandung 2. Walaupun secara geografis KPP Pratama Majalaya berada diwilayah kota bandung tetapi wilayah kerjanya adalah kabupaten bandung selatan. Pada tahun 2006, Kabupaten Bandung terdiri dari 45 kecamatan dengan jumlah desa seluruhnya 431 desa dan 9 kelurahan. Sejak tahun 2007, berdasasrkan Undang-undang nomor 12 tahun 2007, kabupaten ini dimekarkan menjadi kabupaten bandung dan kabupaten bandung barat. Adapun wilayah kabupaten bandung yang menjadi tanggung jawab KPP Pratama Majalaya sejumlah 15 kecamatan.

Visi dan Misi KPP Pratama Majalaya

Visi KPP Paratama Majalaya

Menjadi Kantor Pelayanan yang bekerja sesuai dengan nilai-nilai organisasi untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan menghimpun penerimaan Negara.

Misi KPP Pratama Majalaya

Menghimpun penerimaan pajak melebihi target yang ditetapkan dengan memberikan pelayanan perpajakan yang efektif kepada wajib pajak.

Moto dan janji layanan untuk mencapai visi & misinya yaitu:

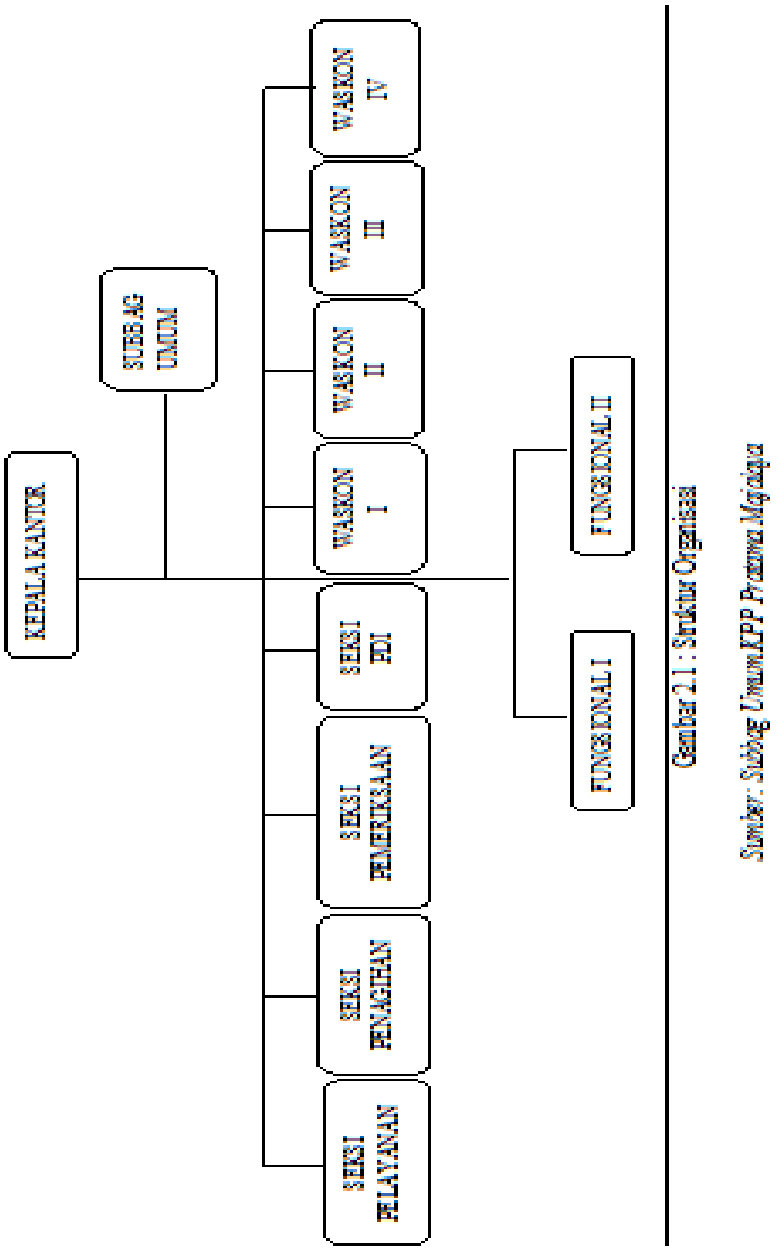
CERMAT : Cepat – Efesien – Ramah – Mudah – Adil - Tepat Waktu

Janji layanan : "Melayani dengan CERMAT untuk kepuasan dan kepatuhan wajib pajak"

2.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Majalaya

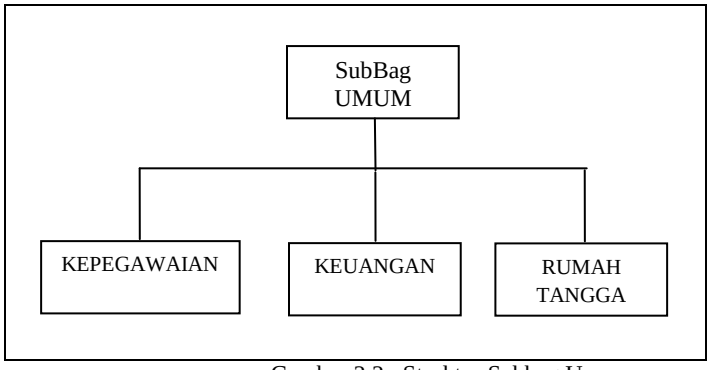
Yang dimaksud dengan struktur organisasi adalah suatu rangkaian yang mewujudkan pola tetap dari hubungan-hubungan diantara bidang kerja, namun orang mewujudkan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab dalam sisitem kerja sama.

KPP Pratama Majalaya dikepalai oleh seorang Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang terdiri atas sub bagian Tata Usaha dan beberapa seksi yang dipimpin oleh masing-masing kepala seksi. Namun setelah adanya modernisasi perpajakan tahun 2006 s.d 2008 Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan maka KantorPelayananPajakPratama terbagi menjadi beberapa seksi yaitu:



Gambar 2.1 : Struktur Organisasi

Sumber: *Subbag Umum KPP Pratama Majalaya*



Gambar 2.2 : Struktur Subbag Umum

Sumber: Subbag Umum KPP Pratama Majalaya

2.3 Uraian Tugas Seksi-seksi di KPP Pratama Majalaya

Suatu organisasi untuk mencapai tujuannya, maka diperlukan uraian tugas yang jelas dan teratur. Uraian tugas adalah yang menjelaskan jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap pegawai/setiap pemegang posisi untuk mencapai tujuan organiasasi, berikut adalah uraian tugas beserta fungsi dan peran masing – masing unit pada KPP Pratama Majalaya :

1. Kepala Kantor

   Kepala kantor memiliki tugas untuk mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan operasional di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan pajak tidak langsung lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam wilayah wewenangnya untuk meningkatkan kewajiban perpajakan.

Serta bertanggungjawab untuk menegakkan kedisiplinan dan memberikan pengarahan kepada pegawai.

2. Sub Bagian Umum

   Sub bagian umum memiliki tugas melaksanakan pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas KPP.

3. Seksi Pelayanan

   Bertanggung jawab membantu pelaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, dan pelaksanaan registrasi Wajib Pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Seksi Penagihan

   Memiliki wewenang dalam melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta bertanggung jawab dalam penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Seksi Pemeriksaan

   Bertangung jawab melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

6. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

   Bertugas mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, dan penyiapan laporan kinerja.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

   Bertugas melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan. Bertanggung jawab dalam penyusunan Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2.4 Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya dibagi menjadi beberapa bagian dimana setiap bagian memiliki kegiatan berbeda yang saling berkaitan. mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan di bidang perpajakan yang meliputi PPh, PPN, PPnBM, PTLL,dan PBB sektor P3 dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.